

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi terdapat dalam laporan keuangan dan laporan tahunan sangat penting bagi pemangku kepentingan perusahaan. Informasi *stakeholder* menggunakannya sebagai pertimbangan keputusan, seperti keputusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lain. Untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan perusahaan harus melakukan pengungkapan penuh, dan transparan tentang aktivitas perusahaan dalam laporan tahunan. Laporan tahunan perusahaan tidak hanya memuat aspek *financial*, tetapi juga aspek *non financial*. Hal ini karena informasi keuangan saja tidak cukup untuk dipertimbangkan keputusan bisnis. Bagian non-keuangan memberikan informasi persyaratan tambahan untuk pemangku kepentingan, termasuk dengan risiko perusahaan. Perusahaan dapat memberikan informasi secara lebih transparan, termasuk pengungkapan informasi terkait risiko perusahaan, karena pengguna menggunakan laporan keuangan untuk keperluan investasi dan menentukan status perusahaan. Risiko yang ada dalam setiap aktivitas bisnis, menurut perusahaan untuk dapat mengontrol dan memberikan solusi terkait manajemen risiko. Keberadaan risiko dalam setiap kerugian usaha, mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan risiko yang efektif.

Manajemen risiko dalam suatu perusahaan merupakan dasar untuk menciptakan nilai dan melindungi nilai perusahaan secara keseluruhan agar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen risiko dianggap sebagai kewajiban perusahaan untuk mencegah kemungkinan terhambatnya kegiatan operasional. Manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan mendorong perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan yang objektif. Manajemen risiko yang terintegritas dan menyeluruh akan membantu perusahaan mencari berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Karena fungsinya yang sangat penting, manajemen risiko hendaknya tidak hanya menjadi konsep formal, tetapi juga alternatif untuk mencapai tujuan yang objektif, dan harus

dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan *corporate governance* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko perusahaan. Dengan demikian, karena informasi terkait risiko perusahaan, maka kualitas laporan keuangan perusahaan akan meningkat. Peningkatan *corporate governance* dapat dilakukan dengan penerapan manajemen risiko untuk menghindari dan mengelola risiko di perusahaan.

Perusahaan yang telah menyadari bahwa risiko yang timbul sangatlah berpengaruh bagi keberlangsungan hidupnya, mulai menggunakan manajemen risiko untuk mengelola risiko tersebut. Manajemen risiko merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Pengelolaan risiko sangat penting untuk diperhatikan karena kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko telah menimbulkan kerugian besar bahkan mengakibatkan kebangkrutan (Agista et al., 2017). Pelaksanaan kerangka manajemen risiko perusahaan atau *enterprise risk management* (ERM) dalam perusahaan dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap divisi. ERM tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan *internal* dan *eksternal* dalam perusahaan.

Penerapan manajemen risiko terintegrasi atau *Enterprise Risk Management* (ERM) setiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki berbagai hambatan. Risiko hambatan diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) hambatan, antara lain belum adanya *roadmap* manajemen risiko dalam strategi perusahaan, belum adanya sumber daya yang memadai seperti teknologi, sumber daya manusia, dan anggaran, serta belum adanya informasi dan pelatihan yang cukup untuk memulai penerapan manajemen risiko.

Risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari dan dihapuskan, namun dengan adanya *Enterprise Risk Management* maka risiko dapat dikelola sehingga dapat diminimalisir dan diramalkan (Frianty, et, al., 2016). Risiko selalu ada didalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pula risiko yang mengintainya. Karenanya, perusahaan dituntut untuk mengendalikan dan meminimalisir risiko tersebut agar tidak merugikan para *stakeholder* atau perusahaan itu sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan manajemen risiko. Manajemen risiko sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko usaha yang akan terjadi. Setelah manajemenrisiko dibuat, selanjutnya harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Pengungkapan manajemen risiko merupakan satu bentuk tanggungjawab perusahaan dalam mengontrol aktivitas manajemen sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan pada laporan keuangan. Penerapan dan pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) merupakan salah satu sinyal yang diberikan perusahaan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dibandingkan perusahaan lain karena telah menerapkan prinsip transparansi (Meizaroh et, al., 2011). Pengungkapan manajemen risiko dapat diartikan sebagai penyedia dan penyampaian informasi mengenai pengelolaan risiko perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan harus dipahami, dipercaya, relevan, dan transparan. Pengungkapan manajemen risiko perusahaan perlu dilakukan secara berimbang artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif terutama yang terkait dengan aspek risiko manajemen. Pentingnya pengungkapan risiko telah membuat badan regulator di Indonesia mengeluarkan aturan-aturan yang mengharuskan adanya informasi terkait risiko yang dilaporkan perusahaan dalam *annual report*. Seperti yang tertuang dalam PSAK No. 60 (Revisi 2010) tentang instrumen keuangan: pengungkapan yang menyebutkan bahwa informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk

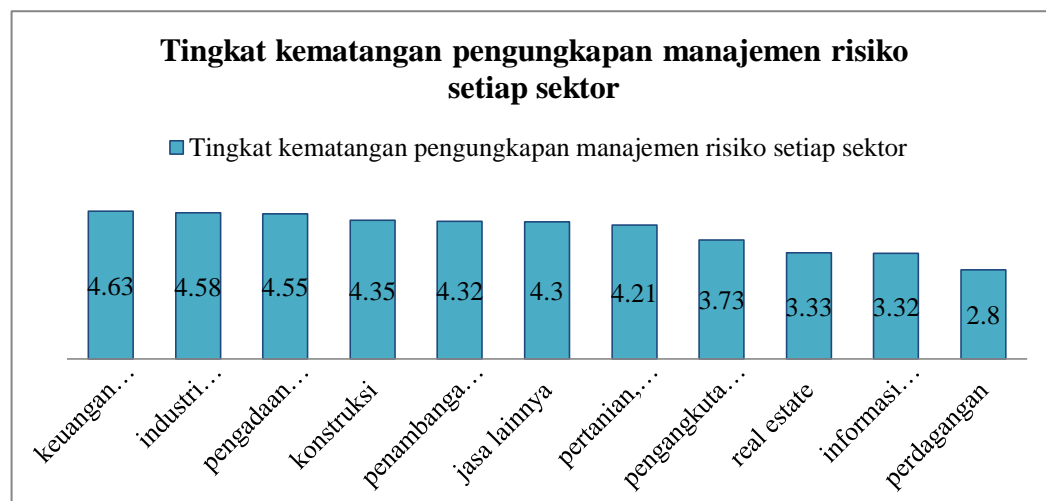
mengevaluasi jenis dan tingkatan risiko dari instrumen keuangan harus diungkapkan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif, entitas diwajibkan mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan dalam pengungkapan kuantitatif, entitas diharuskan mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko.

Peraturan lain yang mengatur tentang pengungkapan risiko adalah keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan penjelasan mengenai risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko. Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) menjadi sangat penting untuk para investor sejalan dengan banyaknya ketidakpastian yang akan muncul pada dunia bisnis. Hal-hal yang mengganggu tingkat profitabilitas perusahaan bermula dari risiko yang berasal dari internal maupun eksternal, maka dari itu apabila setiap perusahaan yang tidak memiliki manajemen risiko dengan baik bisa mengalami kerumitan dalam bisnisnya.

Bank Indonesia juga memiliki ketentuan tersendiri terkait dengan permasalahan pengungkapan risiko seperti yang tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank. Peraturan tersebut mengharuskan Bank untuk menyusun laporan tahunan paling kurang mencakup jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko paling kurang untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum.

Berdasarkan pada ketiga regulasi diatas, perusahaan keuangan memiliki ketentuan yang lebih ketat terkait pengungkapan risiko daripada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI. Ketentuan yang membedakan keduanya yaitu selain harus memenuhi ketentuan PSAK 60 dan keputusan ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012, perusahaan keuangan juga diwajibkan memenuhi ketentuan minimum pengungkapan seperti yang diisyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012. Ketentuan lain yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/PJOK.03/2016 menyebutkan bahwa perusahaan keuangan diwajibkan mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko. Bank Indonesia membuat kategori risiko yang terdiri dari 8 kategori yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi.

Tingkat kelengkapan yang tinggi tidak hanya membutuhkan informasi tentang angka akuntansi dalam laporan keuangan, tetapi juga membutuhkan pengungkapan informasi lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan (Anggraini, 2019).



Gambar. 1.1 *Tingkat kematangan pengungkapan manajemen risiko setiap sektor*

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perusahaan keuangan dan asuransi menduduki posisi tertinggi dalam tingkat kematangan manajemen risiko, disusul oleh perusahaan industri pengolahan yang memiliki tingkat kematangan manajemen

risiko sebesar 4,58%. Ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan memiliki dan menerapkan regulasinya cukup memadai, sehingga tingkat kematangan manajemen risikonya cukup tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya menempati posisi kedua dibawah sektor keuangan dan asuransi yang memiliki tingkat kematangan manajemen risiko sebesar 4,63%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan memiliki tingkat kematangan manajemen risiko dibawah sektor keuangan, yang menandakan belum maksimalnya pengungkapan manajemen risiko yang diterapkan pada perusahaan sektor industri pengolahan. Hal tersebut bisa saja terjadi karena regulasi mengenai pengungkapan manajemen risiko bagi perusahaan sektor non-keuangan masih bersifat sukarela.

Fenomena mengenai kasus pengungkapan manajemen risiko terjadi pada beberapa perusahaan besar, Salah satunya terjadi kasus gagal bayar dimana gagal bayar termasuk kedalam salah satu jenis risiko kredit dalam dimensi ke 5 (lima) yaitu respon risiko (*Risk Response*) dalam pengungkapan risiko yang dilakukan oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*), kasus bermula dari gagal bayar *Medium Term Notes* (MTN) yang diterbitkan *SNP Finance* pada 9 mei 2018. Total kewajiban bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp. 6,75 miliar dari 2 (dua) seri MTN. Menurut data dari KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), seluruh nilai MTN adalah sebesar Rp. 1,852 triliun dengan jatuh tempo dan seri yang berbeda. Kasus kemudian berlanjut, perseroan juga kesulitan dalam membayar utang kepada para krediturnya. Nilai kredit *SNP Finance* kepada 14 bank mencapai Rp. 6 triliun (CRMS Indonesia, 2018).

Kasus *SNP Finance* ini dianggap mencoreng reputasi perusahaan keuangan, karena banyak yang terlibat masalah dengan *SNP Finance* sebenarnya adalah Bank yang memiliki manajemen risiko yang baik. Ini membuktikan bahwa walaupun perusahaan keuangan telah memiliki manajemen risiko yang baik, perusahaan keuangan masih belum tentu dapat menghindari risiko ketidakpastian dan benturan dengan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya pengendalian terkait risiko yang terjadi di perusahaan keuangan dan *Corporate Governance* di perusahaan keuangan kurang

dikelola dengan baik serta adanya kelemahan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu, pengungkapan manajemen risiko akan membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan mengelola risiko atau menghindari kemungkinan terjadinya risiko di perusahaan keuangan Indonesia.

Beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM), diantaranya yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tingkatan dari suatu perusahaan yang menunjukkan kekayaan perusahaan melalui kapasitas tenaga kerja, kapasitas produksi, kapasitas modal yang digunakannya (Tarantika et, al., 2019). Menurut penelitian sebelumnya (Yanto et. Al., 2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dengan pengungkapan ERM.

Faktor kedua yaitu *Risk Management committee* (RMC) adalah komite yang lebih fokus terhadap masalah risiko yang dinilai dapat mendukung dewan komisaris untuk mengawasi risiko dan manajemen pengendalian. Pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) di perusahaan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh dewan komite sebagai bagian dari *corporate governance* untuk meningkatkan ERM. Keberadaan dari RMC ini akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dan meningkatkan kualitas penilaian dan pengawasan risiko dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan (Triananda et, al., 2017). Menurut penelitian (Desak Nyoman et, al., 2020) sejalan dengan penelitian (Yanto et. Al., 2013) yang mengungkapkan bukti empiris bahwa *Risk Management Committee* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Ketiga *Big Four* memberikan pedoman dalam pelaksanaan *good corporate governance* dapat membantu internal audit di perusahaan dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan mengevaluasi sehingga meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan (Kumalasari, et, Al., 2014). Auditor yang memiliki reputasi dan kualitas yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh pemegang kepentingan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi

kinerja perusahaan khususnya dalam pengungkapan manajemen risiko (ERM). Dalam penelitiannya (Yanto et. Al., 2013) mengemukakan bukti empiris bahwa *big four* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Rustiarini (2012) menjelaskan auditor dengan kualitas kinerja yang tinggi lebih dipercaya oleh pihak *stakeholder* dalam melakukan tugasnya untuk melakukan *monitoring* terhadap perusahaan. Selain itu, terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang di audit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM dibandingkan dengan perusahaan yang di audit *non big four*.

Faktor keempat yaitu konsentrasi kepemilikan menunjukkan pemegang saham mayoritas atau pemilik saham terbesar perusahaan dalam mengontrol manajemen perusahaan dan menuntut perusahaan agar lebih transparan dalam mengungkapkan informasi risiko yang lebih luas (Agista et, Al., 2017). Semakin besar tingkat konsentrasi kepemilikan didalam perusahaan, maka semakin kuat tuntutan perusahaan untuk semakin luas dalam mengungkapkan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan (Pangestuti et, al., 2017). Menurut penelitian (Nyoman, et, Al. 2020) sejalan dengan (Yanto et. Al., 2013) yang mengemukakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yaitu *Chief Risk Officer* (CRO). *Chief Risk Officer* (CRO) yang bertanggung jawab mengimplementasikan ERM dalam suatu perusahaan. Peran CRO adalah bekerjasama dengan manajer perusahaan lain untuk mendirikan sebuah manajemen risiko yang efektif, efisien dan menyebar luaskan informasi risiko untuk seluruh perusahaan (Seidi et. Al, 2012). Adanya CRO dalam perusahaan juga dapat digunakan sebagai sinyal *stakeholder* bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan dan melakukan manajemen risiko dengan baik dan memiliki pengawasan luas atas risiko yang lebih baik dari perusahaan lain (Syifa', 2013). Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management*

(L Layyinatasy, 2013). namun di Indonesia sendiri penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko di perusahaan keuangan masih sedikit.

Sering terjadi adanya perusahaan yang melakukan manipulasi dalam laporan keuangannya. Manipulasi laporan keuangan dapat berupa salah saji atau pengabaian jumlah yang dilakukan dengan sengaja untuk menunjukkan kepada *stakeholder* bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Manipulasi dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko yang baik, yang mengakibatkan perusahaan tidak siap dalam menghadapi risiko, sehingga menimbulkan kerugian. Di Indonesia, kasus-kasus kecurangan dalam laporan keuangan telah terjadi dalam berbagai sektor perusahaan, salah satunya adalah perusahaan sektor keuangan.

Karena adanya fenomena yang telah dijelaskan diatas maka dapat menimbulkan keraguan para pengguna laporan keuangan terhadap keakuratan dan transparansi laporan keuangan tahunan perusahaan. *Risk Management Disclosure* merupakan salah satu solusi untuk membantu mengontrol aktifitas manajemen sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik kecurangan laporan keuangan, sehingga pengungkapan risiko manajemen harus diungkapkan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya agar investor dan pemakai informasi lainnya tidak keliru dalam mengambil keputusan investasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yanto et. Al, (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penambahan variabel *independen* berupa *Chief Risk Officer (CRO)* dikarenakan merupakan saran dari penelitian sebelumnya, selain itu perusahaan memerlukan CRO agar manajemen risiko lebih efektif dan efisien. Adanya CRO dalam perusahaan juga dapat digunakan sebagai sinyal *stakeholder* bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan dan melakukan manajemen risiko dengan baik dan memiliki pengawasan atas risiko yang lebih baik dari perusahaan lain, menurut penelitian Layyinatasy (2013) *chief risk officer* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ERM. Adapun perbedaan sektor industri yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu perusahaan sektor keuangan, karena sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ruslan (2011) menyatakan bahwa suatu negara akan berhasil dalam mencapai sasaran dalam pembangunan ekonominya bila sektor keuangannya dapat berkembang dengan baik. Alasan lainnya adalah karena penelitian pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM) di perusahaan sektor keuangan di Indonesia masih jarang dilakukan.

Berdasarkan latarbelakang fenomena diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran perusahaan, *Risk Management Committee* (RMC), reputasi auditor, konsentrasi kepemilikan, dan *Chief Risk Officer* (CRO). Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**DETERMINAN PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)**”.

1.2. Ruang Lingkup

Manajemen risiko sangat perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kemungkinan risiko-risiko usaha yang akan terjadi. Setelah manajemen risiko dibuat, selanjutnya harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ruang lingkup penelitian ini adalah peneliti akan berfokus untuk membahas pengaruh ukuran perusahaan, RMC, reputasi auditor, konsentrasi kepemilikan, dan CRO. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode pengamatan tahun 2017-2019. Pemilihan periode ini diharapkan dapat memberikan luas pengungkapan manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)?
2. Apakah *Risk Management Committee* (RMC) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)?

3. Apakah reputasi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)?
4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)?
5. Apakah *Chief Risk Officer* (CRO) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM)?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh *Risk Management Committee* (RMC) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh reputasi auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
4. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).
5. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh *Chief Risk Officer* (CRO) terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi pembaca dan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dan pengetahuan lebih terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko dan memberikan inspirasi untuk dilakukannya penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk terus memperbaiki proses bisnisnya sehingga dapat memberikan return yang sesuai dengan harapan para stakeholder.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dengan melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah penjelasan dari isi setiap BAB, mulai dari BAB I, hingga BAB V. Dimana uraian ini memberikan gambaran langsung tentang isi tiap-tiap BAB yang ada dilampiran ini, berikut sistematika dari skripsi adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

BAB ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, pengertian variabel yang terkait dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang akan diuji.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini terdiri dari penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Dalam BAB ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

BAB ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan serta saran bagi peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Dapat berbentuk tabel dan gambar.